

Program Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Pandeglang

Anita Yunia¹, Janette Maria Pinariya², Diandra Forceila³, Lystia Ivana⁴
Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Sejak tahun 1950, kebutuhan perekonomian global terkait bencana alam naik 14 kali lipat. Bencana alam yang terjadi pada tahun 2018, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di dunia, yang mana diakibatkan oleh tiga fenomena langka. Penelitian ini membahas program Desa Tangguh bencana sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Pandeglang yang menjadi salah satu wilayah yang memiliki dampak kerusakan dan korban jiwa dari fenomena tsunami di Selat Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai langkah kegiatan program serta strategi komunikasi yang mengacu pada konsep mitigasi bencana menurut George D. Haddow dan Kim S. Haddow tahun 2014. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur serta dokumen pendukung lainnya yang dianalisis dengan menggunakan metode Miles & Huberman serta diuji kredibilitasnya dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini menjadi kunci utama sebagai inisiator, perencanaan hingga pada pelaksanaan kegiatan. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana ini dilakukan dengan mengidentifikasi risiko masyarakat, menentukan rencana aksi, pendanaan, melibatkan *opinion leader* sebagai pihak yang diguguhkan masyarakat, membentuk pesan, hingga pada mekanisme saluran komunikasi.

KATA KUNCI

Destana;
Mitigasi;
Risiko;
Masyarakat;
Pandeglang

ABSTRACT

Since 1950, the need for the global economy related to natural disasters has increased 14 fold. The natural disaster that occurred in 2018, put Indonesia into the country with the highest number of victims in the world, which was caused by three rare phenomena. This study discusses about the Desa Tangguh Bencana program as a strategic step for community-based disaster risk reduction in the Pandeglang Regency, which is one of the areas that has the impact of damage and casualties from the tsunami phenomenon in the Sunda Strait. This study aims to obtain information about the activity steps and communication strategies of the program which refers to the concept of disaster mitigation according to George D. Haddow and Kim S. Haddow in 2014. The research method uses a descriptive qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through semi-structured interviews and other supporting documents, which were analyzed using the Miles & Huberman method and tested for credibility by triangulation of sources. The results showed that community participation in this program is the main key as a planning initiator to the implementing activities. These disaster risk reduction efforts are carried out by identifying community risks, determining action plans, funding, involving opinion leaders as parties raised by the community, forming messages, to the communication channel mechanism.

KEYWORDS

Destana;
Mitigation; Risk;
Community;
Pandeglang

PENDAHULUAN

Gugus gunung api dan titik pertemuan lempeng bumi (*Pacific Ring of Fire*) yang tersebar di kepulauan serta kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis menjadikan Indonesia sering diterpa amukan alam (Toyudho, 2018). Berbagai peristiwa bencana yang terus terjadi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah korban bencana kedua terbesar di dunia yakni sebanyak 160 ribu korban jiwa. Namun di tahun 2018, peringkat jumlah korban bencana tersebut justru meningkat menjadi peringkat pertama yang sebelumnya ditempati oleh Haiti (Setyawan, 2019).

Sepanjang tahun 2018, berbagai bencana alam besar seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api serta fenomena likuifaksi tercatat sebagai bencana alam dengan jumlah korban dan kerusakan yang paling tinggi. Dari bencana diatas, pihak BNPB menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh tiga fenomena langka yang sangat jarang terjadi pada bencana-bencana sebelumnya (Safitri, 2018).

Pertama, peristiwa gempa bumi beruntun yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kedua, peristiwa gempa bumi diikuti tsunami dan pergeseran tanah atau likuifaksi di wilayah Sulawesi Tengah, Palu, dan Donggala. Lalu yang ketiga peristiwa tsunami di Selat Sunda yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau sehingga terjadi longsoran di bawah laut yang menyebabkan gelombang air laut menerjang pesisir pantai Banten bagian barat dan sejumlah wilayah di Lampung Selatan (Safitri, 2018).

Salah satu peristiwa yang diangkat dalam penelitian ini adalah peristiwa tsunami di Selat Sunda yang terus menjadi perbincangan pakar dalam mendeteksi penyebab bencana tersebut. Peristiwa ini tidak sedikit mengingatkan masyarakat pada letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang tercatat sebagai bencana terdahsyat dalam sejarah dunia (Pratama, 2018). Sebelum letusan 1883 terjadi, aktivitas seismik di sekitar Gunung Krakatau tercatat sangat tinggi menyebabkan sejumlah gempa bumi yang getarannya dapat dirasakan hingga ke Australia. Namun langkanya, peristiwa tsunami di Selat Sunda yang terjadi 22 Desember 2018 lalu tidak sedikitpun ditandai oleh aktivitas tektonik (gempa bumi), melainkan diakibatkan oleh aktivitas vulkanik yakni longsoran bawah laut Gunung Anak Krakatau. Secara keilmuan, penyebab tersebut dapat dianggap logis, karena erupsi gunung berapi dapat menyebabkan badan gunung longsor ke perairan yang menyebabkan kolom laut menjadi tidak stabil hingga pada akhirnya membangkitkan gelombang air laut (Julius, 2019).

Berdasarkan data BNPB, kerusakan total panjang pantai terdampak yaitu sebesar 312,78 KM, yang mana kerusakan tertinggi ada pada wilayah Kabupaten Pandeglang. Meskipun jumlah korban jiwa akibat peristiwa ini tidak sebesar bencana di Palu dan NTB, namun tsunami yang terjadi secara tiba-tiba ini mendapat perhatian yang lebih dan tidak sedikit pakar kebencanaan dunia khawatir. Disisi lain, Jepang yang juga kerap dilanda gempa bumi

menyatakan bahwa negaranya belum tentu dapat memprediksi tsunami seperti halnya yang terjadi dalam peristiwa di Selat Sunda.

Hal ini memperlihatkan bahwa negara Indonesia rawan bencana. Nugroho (dalam Nugroho, Ariandina & Saputra, 2018) menyebutkan bahwa secara umum tingkat kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat belum maksimal, sehingga upaya penanggulangan belum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang terlihat masih gugup ketika melakukan evakuasi bencana.

Sejauh ini institusi-institusi yang berkaitan dengan masalah kebencanaan di Indonesia belum dapat memprediksi penyebab-penyebab bencana yang termasuk dalam kategori baru, artinya ciri-ciri bencana yang baru terjadi memiliki perbedaan dengan ciri-ciri bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti contohnya dalam peristiwa tsunami di Selat Sunda. Nugroho (dalam Abdi, 2018) menyebutkan bahwa sistem peringatan dini saat ini masih terbatas pada tsunami yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik saja. Sehingga dalam hal ini, banyak pakar menyebutkan bahwa sistem peringatan dini bencana di Indonesia masih sangat lemah. Nugroho (dalam Nugroho, Ariandina & Saputra, 2018) menyebutkan “ini menyangkut masalah budaya sadar bencana. Pengetahuan bencana (masyarakat Indonesia) meningkat sejak tsunami Aceh, tapi belum menjadi sikap perilaku dan mitigasi kita masih cukup lemah”.

Dalam hal ini, pakar gempa Universitas Southampton, Stephen Hicks (dalam Makki, 2018) juga menyebutkan bahwa negara Indonesia telah memperlihatkan kepada banyak negara di belahan dunia tentang kegiatan alam yang dapat menjadi pemicu terjadinya tsunami. Menurutnya, peristiwa di Selat Sunda ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan tantangan baru bagi akademisi, pemerintahan, media, lembaga maupun masyarakat untuk dapat mempelajari serta menelaah faktor-faktor penting pemicu terjadinya bencana untuk dapat menentukan upaya pencegahan selanjutnya.

Dalam peristiwa ini, Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) Banten, Zaenal Arifin (dalam Deslatama, 2019) mengungkapkan bahwa komunikasi bencana perlu dievaluasi. Istilah komunikasi bencana memang belum menjadi konsep populer dalam bidang komunikasi maupun kebencanaan. Meskipun telah banyak penelitian terkait komunikasi bencana yang dilakukan, namun kajian komunikasi bencana baru banyak diterapkan setelah adanya peristiwa gempa bumi yang kemudian disusul tsunami di Aceh pada tahun 2004 lalu (Rudianto, 2015).

Definisi mitigasi menurut UU No.24 tahun 2007 adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Wardyaningrum (2014) menyebutkan bahwa mitigasi merupakan tindakan pencegahan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak risiko bencana, baik terhadap harta benda maupun korban jiwa. Kaitan antar komunikasi yang dihubungkan dengan mitigasi bencana sangat

diperlukan karena perencanaan dan pengelolaan arus informasi dan komunikasi akan menentukan sebuah kredibilitas, kepercayaan, otoritas dan efektivitas mitigasi bencana.

Komunikasi mitigasi ini juga memiliki peran penting untuk menyinergikan kebijakan pemerintah dan program lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana (Lestari, Prabowo & Wibawa, 2012). Kehadiran BNPB di tingkat nasional, BPBD di tingkat daerah/wilayah serta kepanjangan tangan pemerintah sebagai ujung tombak dan pelindung masyarakat dituntut untuk mempunyai rasa tanggung jawab penuh untuk peka terhadap bencana yang terjadi di masyarakat (Sikumbang, Zainun & Zubaidi, 2018). Dalam menjalani fungsi dan tugasnya, pihak penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memahami informasi apa saja yang dibutuhkan serta mempertimbangkan mekanisme komunikasi apa yang digunakan agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Tamitiadini, Dewi & Adila, 2019). Terutama pada era digital, di mana berita atau informasi yang berada di internet dapat menyebar secara luas sehingga dapat diakses masyarakat dengan cepat (Widowati, 2019).

Presiden Jokowi dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh instansi di tanah air untuk dapat saling bersinergi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ia melihat bahwa upaya mitigasi di Indonesia bisa diperbaiki dengan menerapkan manajemen pencegahan dan kesiapsiagaan yang dapat dimulai dengan melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana (Prasetyo, 2020).

Pemerintah pusat melalui BNPB dalam hal ini mendorong untuk membuat strategi pembentukan Desa Tangguh Bencana yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 (Buchari, Santoso & Marlina, 2017). Dalam penelitian (Maarif, Damayanti, Suryanti & Wicaksono, 2012) menyebutkan bahwa nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat adalah modal dasar dalam membangun Destana. Pemetaan sifat dan karakteristik suatu wilayah merupakan langkah penting untuk memahami tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat.

BNPB menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana ini tidak hanya mendorong pemerintah, melainkan juga perlu untuk dapat menggerakkan individu, keluarga, komunitas yang melingkup seluruh lapisan masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat didefinisikan sebagai langkah pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (Maulana, 2019).

Langkah ini dilaksanakan dengan membentuk program Desa Tangguh Bencana pada tahun 2012 yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dalam latar belakang tersebut menjelaskan bahwa bencana alam yang terjadi telah menghancurkan banyaknya hasil pembangunan yang diperoleh dengan susah payah. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana juga telah

mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pengentas kemiskinan.

Saat bencana terjadi, tidak sedikit masyarakat miskin dan kaum marjinal yang tinggal di wilayah rawan menjadi pihak yang terdampak paling dirugikan. Apabila risiko masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, dikhawatirkan akan memicu terjadinya krisis. Maka dari itu, diperlukan suatu langkah optimal untuk dapat mengantisipasi situasi darurat krisis. Dalam hal ini, pemerintah bersama-sama menindaklanjuti aksi pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan program mitigasi berbasis masyarakat yang sesuai dengan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan komunikasi mitigasi bencana dalam program Destana sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ini di wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan, hambatan serta cara mengatasi hambatan dalam upaya tersebut. Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan perusahaan, organisasi serta instansi terkait penanggulangan bencana sebagai bahan referensi, evaluasi dan inovasi dalam menerapkan langkah program dan strategi komunikasi mitigasi bencana berbasis masyarakat yang terpadu, efektif, dan efisien. Serta menjadi masukan dan pelajaran bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan potensi bencana yang terjadi di wilayahnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dari bulan Januari – September 2020, bertepatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lindlof dan Taylor (dalam West & Turner, 2002) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan untuk pendekatan interpretatif, di mana penulis ingin meninjau aksi sosial melalui kegiatan lapangan atau observasi untuk memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai cara pandang individu menciptakan dunia sosial (Neuman, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk menemukan permasalahan lebih luas dan terbuka dengan cara meminta pendapat serta ide-ide dari setiap narasumber (Esterberg, 2002, dalam Sugiyono, 2016). Adapun informan yang dipilih adalah Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten dan BPBD Kabupaten Pandeglang, Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang, Manajer PUSDALOPS serta salah satu perwakilan Sekretaris Desa di Kabupaten Pandeglang. Sebagai sumber pendukung, peneliti melakukan pengkajian data melalui studi

kepuustakaan seperti buku, artikel jurnal, artikel berita maupun dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Proses teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan studi Miles and Huberman (1994) yang terdiri dari 4 elemen yaitu *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing and verification*. Setelah teknik analisis data dilakukan, penulis melakukan pengujian kredibilitas data melalui triangulasi. Konsep triangulasi ini diartikan sebagai teknik pengecekan data yang dapat dilakukan dengan memperhatikan sumber, cara dan waktu yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber, dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan serta mengategorisasikan pandangan beberapa sumber yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan dengan sumber data yang penulis peroleh ketika berada di lapangan (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis membahas mengenai hasil analisis penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya dengan menggunakan *Risk and Crisis Communication Management Theory* yang dikembangkan oleh Matthew Seeger serta konsep mitigasi bencana dari George D. Haddow dan Kim S. Haddow yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian ini. Reynolds dan Seeger (2005, dalam Schwarz, Seeger, Auer, 2016) mengusulkan bahwa teori ini merupakan model yang tepat di mana risiko dan komunikasi krisis disatukan dalam bentuk yang lebih terintegrasi. Dalam bukunya disebutkan bahwa komunikasi risiko dan krisis difokuskan untuk pencegahan serta pengurangan risiko bagi masyarakat. Penerapan teori ini sering digunakan komunitas, organisasi, perusahaan bahkan negara untuk mengidentifikasi upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi terjadinya krisis, dimulai dari tahap *prevention*, *preparation*, *respons*, hingga *learning*. Elemen-elemen tersebut dapat dikaitkan dalam manajemen bencana, terutama pada fase mitigasi, karena tahap ini masuk ke dalam kategori pencegahan yang mana memiliki tujuan untuk dapat meminimalisir risiko maupun terjadinya krisis.

Tidak sedikit pakar kebencanaan yang melihat bahwa peristiwa tsunami yang terjadi di Selat Sunda merupakan suatu fenomena langka yang sangat jarang terjadi. Seperti yang diketahui, banyak para ahli yang menuangkan pengetahuan serta pengalaman tentang bencana alam ke dalam studi kepuustakaan yang dapat diakses banyak masyarakat. Dari banyaknya peristiwa bencana yang terjadi, telah memperlihatkan bahwa naiknya gelombang air laut (tsunami) disebabkan adanya getaran atau gelombang tektonik dari bawah laut, yang mana dapat menjadi peringatan dini bagi masyarakat yang menandakan bahwa potensi tsunami kemungkinan dapat terjadi.

Namun fakta lain terjadi bahwa tsunami di Selat Sunda yang datang secara tiba-tiba ini membuat masyarakat bingung dan khawatir. Hal ini tentu menjadi banyak perhatian pemerintah, lembaga usaha, akademisi, media maupun masyarakat untuk dapat mengetahui dan menindaklanjuti upaya mitigasi selanjutnya. Sehingga membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan komunikasi mitigasi di wilayah Kabupaten Pandeglang yang mana merupakan salah satu wilayah yang memiliki dampak kerusakan dan korban jiwa yang paling tinggi.

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil analisis yang telah penulis lakukan, penelitian ini telah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan komunikasi mitigasi di Kabupaten Pandeglang, yakni melalui program Desa Tangguh Bencana yang dijadikan sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Dalam hal ini, penulis melakukan analisa dengan menggunakan dua elemen utama dalam konsep mitigasi bencana yang terdiri dari langkah kegiatan program dan strategi komunikasi. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, penerapan komunikasi mitigasi dalam program Destana ini merupakan tindakan *prevention* yang mana masuk ke dalam tahap utama dalam *Risk and Crisis Communication Management Theory*. Schwarz, Seeger, Auer (2016) menyebutkan bahwa komunikasi risiko dan krisis dapat disatukan ke dalam bentuk yang lebih terintegrasi yang mana dapat dikembangkan untuk kebutuhan bencana.

“Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model in which risk or warning messages and crisis communication are brought together into a more integrated form. The model mentions various crisis phases and stresses that stake- holder needs should be taken into account (Veil et al., 2008, dalam Schwarz, Seeger, Auer, 2013). The CERC model served as the basis for a communication scorecard developed for disasters and pandemics (Vos et al., 2011, dalam Schwarz, Seeger, Auer, 2013, p.97)”

Dari penjabaran diatas, penulis secara mendalam mengetahui upaya mitigasi dalam program Destana ini ke dalam beberapa elemen yaitu sebagai berikut:

Langkah Kegiatan Program

Elemen pertama yang diteliti adalah program berbasis masyarakat yang dilakukan BPBD Kabupaten sebagai program prioritas nasional yang dibentuk BNPB pada tahun 2012. Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat para pihak penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah menindaklanjuti untuk dapat melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan penanggulangan bencana. Selain diakibatkan oleh minimnya sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dinilai sangat penting karena pada dasarnya masyarakat sendiri lah yang menjadi korban bencana, terutama pada kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Mengingat hal ini, pemerintah mulai mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang sesuai dengan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan yang tangguh terhadap bencana atau yang biasa disebut Destana.

Untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang sendiri, program ini baru mulai terbentuk di tahun 2015. Dalam hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa program ini sejak awal dibentuk sampai saat ini masih menjadi program yang diprioritaskan untuk mengurangi risiko bencana yang juga didukung dengan program bantuan lainnya seperti Sekolah Aman Bencana, Taruna Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana dan lainnya.

Sesuai dengan defisini Destana yang tercantum dalam Perka BNPB No. 1 tahun 2012 bahwa pengembangan program Destana bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman bencana yang berpotensi di wilayahnya. Seperti misalnya pada contoh kasus desa X yang sering mengalami kendala banjir, maka Destana yang dibentuk adalah Destana Banjir, kemudian desa Y sering mengalami gempa akan dibentuk Destana Gempa begitupun seterusnya.

Demikian hal ini diterapkan BPBD Kabupaten Pandeglang, yang mana wilayahnya memiliki 13 jenis ancaman bencana, antara lain adalah banjir, banjir genangan, longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran, bencana sosial, gunung meletus, penyakit epidemi, kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan bencana industri. Banyaknya potensi bencana yang terjadi di wilayah ini membuat aparat sulit untuk melakukan identifikasi, aksi maupun evaluasi untuk setiap jenis bencana yang terjadi, sehingga diperlukan pemetaan Destana dengan basis potensi bencana yang terjadi di masing-masing wilayah. Dalam hal ini, bencana yang terjadi perlu dilakukan pengkajian terlebih dahulu untuk dapat membentuk kegiatan yang akan diprioritaskan. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bencana kepada masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan, pelatihan serta peningkatan kapasitas.

Sampai saat ini sosialisasi sendiri memang masih menjadi bentuk kegiatan utama. Tujuan dari upaya ini tidak lain agar masyarakat dapat menyesuaikan dirinya dengan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Informasi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi pun beragam, dimulai dari bahaya bencana, cara menanggulangi bencana, jalur evakuasi, simbol-simbol bencana dan lain sebagainya. Pengetahuan yang saat ini banyak diterapkan ke masyarakat setelah terjadinya peristiwa tsunami di Selat Sunda adalah tentang jalur evakuasi dan simbol bencana. Karena saat tsunami terjadi, masih banyak masyarakat yang bingung dan kurang paham untuk melakukan evakuasi sehingga terjadi saling bertabrakan, tersesat, dan menimbulkan kecelakaan lainnya. Hal ini lah yang saat ini masih menjadi PR BPBD Kabupaten Pandeglang untuk menentukan ke arah mana masyarakat untuk tetap aman.

Kegiatan selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam tanggap bencana. Pelatihan dan pendampingan ini antara lain adalah tentang evakuasi korban bencana, cara memasang tenda pengungsian, memasak, cara menggunakan alat komunikasi, simulasi tsunami, dan masih banyak lainnya. Upaya ini biasanya dilakukan ketika tidak ada kegiatan rutin, di sela-sela waktu, sehingga masyarakat diupayakan untuk tetap produktif. Peningkatan kapasitas ini biasa dibentuk dengan kompetisi, seperti bagaimana cara memasak 3000 porsi dalam hitungan jam, pertemuan selanjutnya akan terus ditingkatkan yang mana tujuannya adalah untuk mengukur keterampilan yang dimiliki.

Untuk dapat menunjang keberhasilan kegiatan dalam program ini, maka diperlukan sumber dukungan dana yang dapat diperoleh dari berbagai lintas sektor. Pada umumnya, bantuan program Destana diperoleh dari pusat yakni BNPB dan Provinsi. Namun karena banyaknya Destana yang terbentuk di berbagai provinsi di Indonesia, maka setiap wilayahnya mendapatkan dana yang tidak terlalu besar sehingga belum banyak desa di Kabupaten Pandeglang yang bisa melaksanakan desa berbasis masyarakat ini. Meskipun demikian, perkembangan Destana yang sudah terbentuk saat ini tidak lepas dari bantuan dana APBN, APBD serta dunia usaha. Tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, pihak perusahaan juga ikut berpartisipasi aktif memberikan bantuan kemanusiaan seperti kegiatan sosialisasi dan edukasi sampai pada bantuan evakuasi korban bencana. Bantuan yang diperoleh dari dunia usaha sendiri tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang juga peduli dengan banyaknya potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Pandeglang yang didapat dalam bentuk sumbangan atau donasi.

Strategi Komunikasi Program

Berdasarkan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 bahwa upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana sebagai pelaku utama yang berpartisipasi aktif berkelanjutan dan berdaya guna. Dalam hal ini, segala bentuk penyelenggaraan program Destana merupakan pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik itu tentang hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, dan hak mendapatkan pertolongan atau bantuan ketika terjadi bencana.

Artinya semua masyarakat yang berada di suatu wilayah wajib untuk dapat menyampaikan suara dan aspirasinya dalam proses pengembangan program, mereka juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, serta memberikan akses layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses jalannya program.

Dalam hal ini, Destana yang sudah terbentuk di wilayah Kabupaten Pandeglang membentuk suatu forum kebencanaan yang mana didalamnya melibatkan semua lapisan masyarakat, baik dari pihak Kelurahan, Kepala Desa, Karang Taruna hingga Tokoh Masyarakat. Setelah semua kepengurusan terbentuk, Kepala Desa mulai menyusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, dimulai dari Kepala Pelaksana hingga pada struktur-struktur di bawahnya yang mana semuanya terlibat dalam kesatuan relawan kebencanaan. Artinya, beberapa dusun yang berada di suatu desa yang didalamnya terdapat RT dan RW ikut terlibat menjadi relawan yang nantinya akan dikumpulkan dalam satu wadah desa.

Dalam hal ini, berarti semua pihak internal yang terlibat dalam kepengurusan Destana dianggap sebagai relawan yang bekerja secara sukarela dalam membantu suatu wilayah untuk mengurangi dampak risiko bencana yang signifikan tanpa melibatkan uang sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Meskipun semua pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun terdapat beberapa pihak yang dirasa memiliki kemampuan serta peran penting yang tinggi dalam masyarakat desa, yakni Tokoh Ulama dan Kepala Desa. Wilayah desa di Kabupaten Pandeglang percaya dan meyakini Tokoh Ulama sebagai *opinion leader* yang diguguhkan masyarakat, terutama pada masalah bencana yang mana hal ini memiliki keterkaitan langsung kepada Sang Pencipta-Nya, sehingga informasi tentang kebencanaan cenderung mudah untuk diterima. Kehadiran Tokoh Ulama ini dianggap membawa ketenangan dan kedamaian bagi masyarakat karena penyampaian pesan yang disampaikan berbeda dengan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan, yaitu berupa dalil-dalil kitab suci Al-Qur'an yang dikemas dalam bentuk ceramah atau tausiyah yang biasa dilakukan seminggu sekali.

Kemudian Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat juga memiliki peran penting sebagai dalam menentukan arah dan pengambil keputusan, karena segala bentuk musyawarah yang sudah dihasilkan berdasarkan mufakat tentu akan dipertimbangkan kembali oleh pemimpinnya untuk dapat menimbang keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat tangguh bencana. Meskipun masyarakat menjadi pelaku utama, keberhasilan mewujudkan Destana tidak akan pernah lepas dari dukungan teknis pihak luar yang meliputi unsur Helix lainnya yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar dan media massa.

Dalam hal ini, ketika melihat dari kacamata pemerintah yakni BPBD Kabupaten Pandeglang itu sendiri, pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat ini ada pada Kasie Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dapat melibatkan seksi-seksi lainnya, seperti misalnya Damkelop yang mana berperan membantu menjelaskan hal-hal teknis maupun materi kebencanaan ke masyarakat. Kemudian lanjut pada jajaran yang lebih tinggi yang melibatkan Bupati, Muspida, Sekretaris Daerah kemudian Kepala Bagian Pemerintahan. Disamping itu juga perlu adanya tatanan dan dasar hukum dari kepolisian. Kemudian terkait istilah tatanan, Destana dianggap perlu melibatkan pertahanan dari unsur TNI.

Lanjut pada bidang dunia usaha, dimana banyak sekali yayasan, organisasi maupun perusahaan yang saat ini sudah melibatkan dirinya untuk dapat terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana di sekitar organisasi atau perusahaan beroperasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk wujud tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) antar perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat yang dapat dikemas dalam beberapa kegiatan, seperti misalnya bantuan alat pendeteksi dini, memberikan sosialisasi dan edukasi bencana, serta menyisihkan waktu secara sukarela untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan program kebencanaan.

Kemudian salah satu helix yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana, yakni akademisi atau pakar. Dari sekian banyak bencana yang terjadi, membuat mereka memiliki tekad untuk terus melakukan penguatan edukasi, penelitian dan pengabdian yang selalu akan dijadikan inovasi untuk terus beradaptasi pada bencana yang terjadi. Lalu yang terakhir media massa, yang mana mampu memberikan potret kepada masyarakat di suatu wilayah untuk dapat menerima dan memahami informasi tentang potensi bencana yang terjadi. Penyampaian informasi ini diharapkan juga dapat menjadi langkah untuk memberikan kesadaran masyarakat pada masalah-masalah bencana.

Namun banyaknya informasi bencana yang diberikan, baik pada pihak pemerintah maupun media, tak sedikit membuat masyarakat bingung dan keliru, namun tak sedikit juga yang membuat mereka mengerti dan paham akan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan. Seperti misalnya peristiwa tsunami di Selat Sunda yang sempat menghebohkan berbagai pihak yang mana pada saat itu sempat diprediksi sebagai fenomena alam, namun tak lama menyebar, informasi tersebut dikonfirmasi kembali bahwa gelombang yang terjadi merupakan akibat longoran Gunung Anak Krakatau. Hal ini sempat membuat masyarakat bingung serta waspada untuk beberapa waktu kedepannya karena dikhawatirkan dapat kembali terjadi. Demikian informasi penanggulangan bencana, terkadang upaya sosialisasi dan edukasi yang diberikan pemerintah tidak mudah dicerna dan dipahami masyarakat. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa bencana merupakan takdir Tuhan yang tidak bisa dihindari, namun masih banyak masyarakat yang peduli dan beranggapan bahwa risiko bencana dapat diminimalisir ketika masyarakat mampu menerima dan mempraktikkan informasi yang diterimanya.

Pada prinsipnya, bencana dapat menimpa siapa aja tanpa mempedulikan usia, gender, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Perlu disadari bahwa bencana menjadi urusan bersama, masyarakat lah yang menjadi faktor utama keberhasilan penanggulangan bencana. Mula terbentuknya Destana, segala informasi baik mengenai bahaya bencana, cara menanggulangi bencana, cara mengurangi dampak risiko bencana serta cara memulihkan kondisi setelah bencana diupayakan untuk selalu diberikan kepada masyarakat, dimulai dari Kepala Pelaksana sampai pada lapisan-

lapisan di bawahnya dengan membentuk suatu forum, dimana forum ini diharapkan dapat menjadi wadah pelaporan bencana yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi.

Dalam hal ini, pihak BPBD Kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa ibu-ibu menjadi salah satu bagian masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam mempercepat arus informasi. Hal ini dikarenakan ibu-ibu dinilai sangat aktif dalam bersosialisasi sehingga sangat familiar akan suatu informasi. Tidak hanya itu, data dan informasi juga akan didukung dengan melakukan terjun lapangan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) serta media-media lainnya seperti media massa dan media sosial yang nantinya akan disampaikan ke Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BPBD untuk dapat diarsip dan dievaluasi guna mempersiapkan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana yang aktif sehingga dapat diakses oleh masyarakat, media serta pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian lanjut pada bagian target audiens, program yang disampaikan tentu harus menentukan target mana yang akan menerima pesan. Adapun kalangan yang dijadikan sebagai target audiens dalam program ini dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, terkhusus kaum rentan seperti ibu-ibu, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam konteks komunikasi, pesan merupakan sebuah pokok yang diperlukan untuk dapat saling terhubung dengan target audiens. Pesan yang disampaikan dapat berupa data-data dan informasi yang dikumpulkan, sama halnya pesan komunikasi mitigasi bencana.

Bentuk pesan bencana yang disampaikan tentu berbeda-beda, tergantung pada kegiatan, audiens, kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai. Seperti misalnya saat memberikan sosialisasi kepada anak-anak, tentu pesan dan cara penyampaian yang disajikan disesuaikan dengan tingkat pemahamannya yakni dengan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti anak-anak, dengan tidak menggunakan istilah-istilah asing yang memang jarang ditemui pada umumnya.

Dikarenakan memiliki tujuan tentang bagaimana cara pencegahan-pencegahan serta mengurangi dampak-dampak bencana yang ditimbulkan, maka bentuk pesan yang disajikan dalam program Destana yaitu berupa edukatif. Pesan edukatif ini merupakan pola komunikasi yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bersifat mendidik. Pesan ini biasa disajikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan, dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu ke masyarakat secara *door to door*. Upaya ini dianggap sebagai kegiatan yang efektif untuk mendapat perhatian dari masyarakat serta tidak lupa dengan menyesuaikan yang dipahami banyak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Banjarnasin, dominan masyarakat wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan pendatang yang berasal dari wilayah Sunda, sehingga bahasa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah bahasa Sunda.

Suatu pesan tidak akan ada artinya jika tidak disampaikan melalui mekanisme saluran komunikasi yang ada. Setelah pesan dalam suatu program dibentuk, sudah seharusnya pihak yang terlibat mulai menentukan saluran komunikasi apa saja yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan tersebut.

Saluran komunikasi hingga dulu sampai saat ini sangat beragam, dimulai dari media tradisional hingga pada media berbasis internet. Penggunaan saluran komunikasi dalam suatu program tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perusahaan atau bahkan masyarakat itu sendiri.

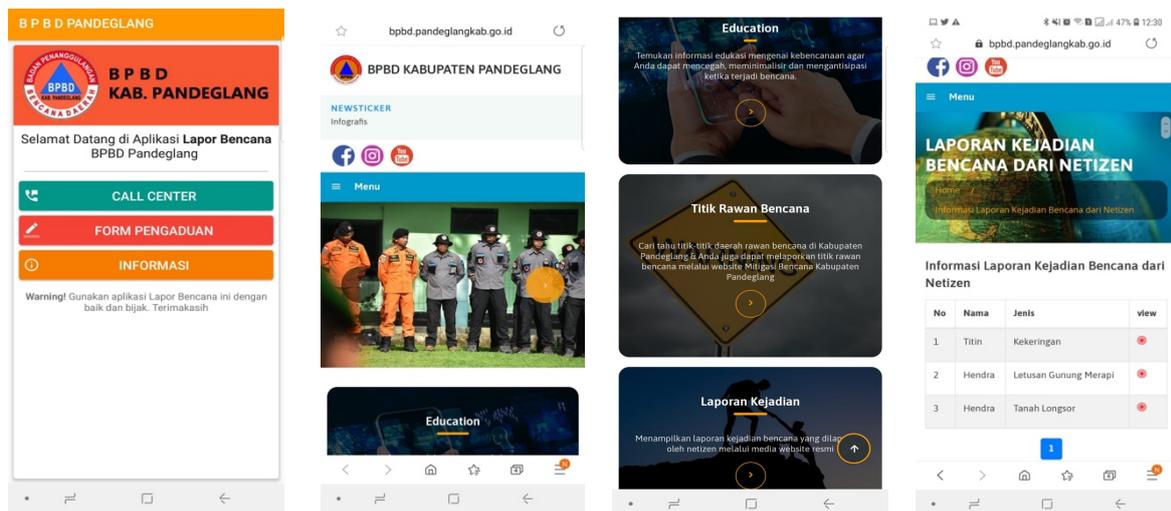
Dalam Destana ini, saluran komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pandeglang adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan secara *door to door* yang mana masih memperhatikan unsur adat istiadat masyarakat, salah satunya yakni penggunaan bahasa. Salah satu bentuk komunikasi ini dilakukan dikarenakan sebagian masyarakat, terutama pada kelompok lansia yang masih awam dalam penggunaan teknologi.

Kemudian untuk media efektif lainnya yaitu *pamphlet* yang mana disebutkan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk dibagikan selebaran-selebaran informasi dalam bentuk *printed*. Dalam hal ini masyarakat terkesan memiliki minat baca yang lebih pada tulisan-tulisan yang disajikan dalam bentuk gambar kartun, grafik, dll. Atau bisa dengan menggunakan buku saku, yang mana informasinya lebih detail dan terperinci dibandingkan *pamphlet* dikarenakan sistemnya pertahun, berbeda dengan *pamphlet* yang hanya digunakan untuk jangka pendek, sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Tidak hanya itu, berkembangnya teknologi di era 4.0 ini juga membuat pihak penanggulangan bencana untuk terus melakukan inovasi dalam saluran komunikasinya, yakni dengan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook hingga menciptakan aplikasi. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Pandeglang menilai bahwa untuk dapat mempercepat arus informasi pada pelaporan bencana, diperlukan suatu aplikasi yang diharapkan dapat menjadi kunci utama untuk mengatasi kondisi darurat serta mengurangi risiko bencana yang efektif.

Aplikasi yang dibentuk diberi nama Lapor Bencana yang baru diluncurkan pada awal bulan Februari 2020. Peluncuran aplikasi ini tidak jauh dengan munculnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kehadiran COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada perusahaan-perusahaan besar, melainkan juga terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini, beberapa pihak BPBD Kabupaten menyebutkan sejak kehadiran COVID-19, banyak sekali program-program bencana yang telah direncanakan harus tertunda dan mulai fokus pada program COVID-19.

Dengan situasi yang saat ini terjadi, kehadiran aplikasi Lapor Bencana ini dianggap menjadi langkah yang tepat untuk dapat dijadikan sebagai saluran komunikasi alternatif dalam hal pelaporan bencana. Jadi di dalam aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memberi serta mendapatkan informasi seputar kejadian bencana. Ketika suatu daerah mengalami bencana, masyarakat dapat secara langsung menginput laporannya untuk dapat diunggah di dalam aplikasi tersebut. Dan hal ini akan mendapatkan respon cepat dari tim penanggulangan bencana yang bertugas. Tidak hanya sebatas media pelaporan, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengetahui berita-berita bencana lainnya yang dapat menjadi sarana edukasi masyarakat.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Lapor Bencana, sumber: Aplikasi Lapor Bencana, 2020

Setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya, hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah memantau segala aktivitas dalam program, melakukan evaluasi, hingga perbaharuan strategi dan taktik komunikasi. Dari beberapa hal yang telah dijabarkan diatas, hingga saat ini program Destana harus dilakukan monitor berkelanjutan, dikarenakan masih banyak masyarakat yang perlu arahan dan bimbingan lebih lanjut, terutama pada pemahaman masyarakat mengenai upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Meskipun sudah mendapat dukungan baik dari masyarakat, BPBD Kabupaten Pandeglang tetap mendapatkan kritikan-kritikan yang akan menjadi PR untuk dapat diperbaiki kedepannya.

Walaupun demikian, adanya peristiwa tsunami di Selat Sunda ini telah memberikan hikmah kepada masyarakat, dari yang awal mulanya tidak peduli menjadi lebih *respect* dengan bencana-bencana yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat ketika terjadi bencana, seperti misalnya beberapa belakangan disebutkan bahwa hampir setiap hari terjadi guncangan gempa lebih dari lima kali yang membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir menanyakan jalur evakuasi bencana.

Hal ini mendapat perhatian dari banyak pihak, dimulai dari universitas-universitas maupun lembaga usaha untuk memberikan sosialisasi-sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk mengatasi risiko bencana yang terjadi. Namun hal itu hanya berlangsung satu tahun saja, di awal tahun 2020 rencana mitigasi berbasis masyarakat ini yang rencananya akan berkembang ke beberapa desa, justru terbengkalai dengan adanya COVID-19, yang mana hal ini membuat BPBD Kabupaten Pandeglang serta jajaran-jajaran lainnya berupaya fokus untuk menangani penyebaran virus ini. Sosialisasi yang diberikan berupa war-war dengan memberikan *pamphlet* secara keliling sekaligus penyemprotan disinfektan pada akhirnya membuat anggaran program menjadi menipis atau bahkan habis.

Untuk rencana kedepannya, setelah COVID-19 ini mulai mereda, pihak penanggulangan bencana ingin membuat Destana menjadi forum yang aktif, yang artinya masyarakat dapat melaporkan segala sesuatunya dapat lebih baik lagi, lebih tangguh lagi dengan membentuk Desa Bersaudara. Artinya, Destana yang sudah dikatakan siap akan dijadikan sebagai *patern* desa di dekatnya. Jadi Desa Bersaudara itu ketika salah satu desa kena bencana mereka tidak perlu kemana-mana, tapi desa setempat setelahnya sudah menampung si X yang korban-korban evakuasi ini.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan komunikasi mitigasi yang dilakukan dalam program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pandeglang yang dijadikan sebagai langkah strategis pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat ini mengacu pada keseluruhan partisipasi masyarakat yang di mana menjadi kunci utama sebagai inisiator, perencana hingga fasilitator pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok siaga bencana/PRB atau tim relawan PB berbasis komunitas, yang mana keduanya perlu menjamin adanya partisipasi dan keterwakilan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang kurang beruntung dalam pembangunan dalam proses pengambilan keputusan.

Kolaborasi antar pihak pemerintah dan non-pemerintah merupakan suatu hal penting. Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, sektor swasta, serta pihak penting lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana, termasuk dalam upaya pengembangan Destana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.

Dalam rangkaianannya, program ini melaksanakan beberapa kegiatan antara lain adalah sosialisasi, pelatihan, pendampingan serta peningkatan kapasitas yang dalam setiap rangkaian kegiatannya melibatkan *opinion leader* sebagai pihak yang diguguhkan dan dipercayai masyarakat dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan ini berupa

informasi yang edukatif dan disampaikan dengan berbagai mekanisme saluran komunikasi, baik dalam media tradisional maupun media baru.

Media tradisional yang dimaksud merupakan media *pamphlet*, dalam hal ini pihak BPBD Kabupaten Pandeglang menyebutkan bahwa media *printed* ini merupakan saluran komunikasi yang paling efektif. Untuk menyampaikannya, BPBD Provinsi Banten menggunakan bentuk komunikasi interpersonal, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara *face to face* atau *door to door*. Sedangkan untuk media baru sendiri yaitu dengan penggunaan media berbasis internet, yakni media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain.

Namun sayangnya, di masa pandemi ini seluruh program Destana terpaksa harus vakum atau berhenti dahulu, hanya memfokuskan pada kegiatan sosialisasi untuk pencegahan penularan COVID-19. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Ulama serta seluruh lapisan masyarakat untuk dapat tetap saling terhubung untuk mengakses informasi melalui media sosial.

Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Pandeglang juga berinisiatif untuk menciptakan aplikasi Laporan Bencana yang dijadikan sebagai saluran komunikasi alternatif untuk pelaporan mitigasi bencana. Di dalam aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memberi serta mendapatkan informasi seputar kejadian bencana. Ketika suatu daerah mengalami bencana, masyarakat dapat secara langsung melaporkannya untuk mendapat tindak lanjut dari pihak penanggulangan bencana. Sehingga dalam hal ini, upaya pengurangan risiko bencana dapat tetap terkoordinasi dengan baik.

Tidak hanya itu, untuk rencana kedepannya BPBD Kabupaten Pandeglang juga berupaya mengembangkan program Destana dengan membentuk Desa Bersaudara. Artinya, desa yang sudah tangguh akan menjadi desa tujuan pengungsian desa sebelahnya. Dengan adanya program ini, masyarakat di Indonesia nantinya diharapkan dapat saling terhubung, menjalin kerja sama dan saling gotong royong tanpa membedakan suku agama, ras, golongan maupun kesukuan untuk tangguh terhadap bencana.

REFERENSI

- Abdi, A.P. (2018, Desember 26). Tsunami Selat Sunda Bukti Lemahnya Mitigasi Bencana di Indonesia? Retrieved from <https://tirto.id/tsunami-selat-sunda-bukti-lemahnya-mitigasi-bencana-di-indonesia-dcz3>
- Buchari, A., Santoso, M.B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus di Desa Pasawahan Kecamatan Tarongong Kaler). *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3 (1), 49-62

- Deslatama, Y. (2019, September 03.). Pemda Banten Dinilai Kurang Wawasan Mitigasi Bencana. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/4053426/pemda-banten-dinilai-kurang-wawasan-mitigasi-bencana>
- Haddow, G.D., Haddow, K.S. (2014). *Disaster Communications In A Changing Media World*. USA: British Library Cataloguing in Publication Data
- Julius, A.M. (2019, April 31). Tsunami Selat Sunda, Sebuah Pembelajaran untuk Mitigasi Bencana. Retrived from <https://sains.kompas.com/read/2019/03/31/230422323/tsunami-selat-sunda-sebuah-pembelajaran-untuk-mitigasi-bencana?page=all>
- Lestari, P., Prabowo, A., & Wibawa, A. (2012). Manajemen Komunikasi Bencana Merapi 2010 pada saat Tanggap Darurat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10 (2), 173-197
- Maarif, S., Damayanti, F., Suryanti, E.D., & Wicaksono, A.P. (2012). Initiation of the Desa Tangguh Bencana Through Stimulus – Response Method. *Indonesian Journal of Geography*. 44 (2), 173-182
- Makki, S. (2018, Desember 31). Pakar Luar Negeri Imbau Indonesia Lebih Sadar Potensi Bencana. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181231144658-106-357546/pakar-luar-negeri-imbau-indonesia-lebih-sadar-potensi-bencana>
- Maulana, C. (2019, April 27). Tingginya Kejadian Bencana, BNPB Dorong Masyarakat Pahami Mitigasi Bencana. Retrieved from <https://swa.co.id/swa/listed-articles/tingginya-kejadian-bencana-bnpb-dorong-masyarakat-pahami-mitigasi-bencana>
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*, Second Edition. USA: Sage Publications
- Neuman, W., L., (2011). *Metodelogi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (7th ed.) (Terjemahan). Jakarta, Indonesia. PT Indeks
- Nugroho, K.W., Atiandina, D., & Saputra, E.H. (2018, Oktober 02). BNPB: Budaya Mitigasi Bencana Masyarakat Indonesia Lemah. Retrieved from <https://kumparan.com/kumparannews/bnpb-budaya-mitigasi-bencana-masyarakat-indonesia-lemah-1538494508088227510/full>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Pratama, A.N. (2018, Desember 24). Saat Gunung Krakatau Sebabkan Tragedi Bencana Besar dalam Sejarah. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/24/15555231/saat-gunung-krakatau-sebabkan-tragedi-bencana-besar-dalam-sejarah?page=all>

- Prasetyo, A. (2020, Februari 04). Mitigasi Bencana Harus dilakukan Bersama. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/read/detail/287676-mitigasi-bencana-harus-dilakukan-bersama-sama>
- Rudianto. (2016). Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Simbolika Ilmu Komunikasi*, 1 (1), 51-61
- Safitri, E. (2018, Desember 31). BNPB Catat Ada 3 Fenomena Langka di Tahun 2018. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4366023/bnpb-catat-ada-3-fenomena-langka-di-tahun-2018>
- Setyawan, F.A. (2019, Agustus 01). BNPB Sebut Indonesia Nomor Wahid Jumlah Korban Bencana 2018. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190801143833-20-417449/bnpb-sebut-indonesia-nomor-wahid-jumlah-korban-bencana-2018>
- Schwarz, A., Seeger M.W., Auer, C. (2016). *The Handbook of International Crisis Communication Research*. UK: Wiley Blackwell
- Sikumbang, A.T., Zaitun, Zubaidi, Z. (2018). Perencanaan Komunikasi Bedan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan dalam Mengurangi Risiko. *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi Islam*, 2 (1), 103-114
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Alfabeta
- Tamitiadini, D., Dewi, W.W.A., & Adila, I. (2019). Inovasi Model Mitigasi Bencana Non Struktural Berbasis Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama. *Jurnal Komunikasi*, 8 (1), 41-52
- Toyudho, E.S. (2018, Desember 30). Deretan Bencana Alam Mematikan yang Menerjang Indonesia Sepanjang 2018. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46691586>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat dalam Inovasi Mitigasi Bencana di Wilayah Rawan Bencana Gunung Merapi. *Jurnal ASPIKOM*, 2(3), 179-197
- West, R., & Turner, L., H., (2008) *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. (B. Marswendy, Terjemahan.). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat
- Widowati, D. (2019). Peran Corporate Communication PT Krakatau Steel Dalam Mengatasi Krisis. *Jurnal Communicare*, 6 (2), 190-203